

**PEMBINAAN BUDI PEKERTI LUHUR ATAU AKHLAK MULIA DI
SEKOLAH**
**(Studi Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015
Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Karakter Siswa Sebagai
Budaya Sekolah Di SMA Negeri 11 Samarinda)**

LINDA NOVITA SARI¹

Abstrak

Linda Novita Sari. Pembinaan Budi Pekerti Luhur atau Akhlak Mulia Di Sekolah (Studi Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Karakter Siswa Sebagai Budaya Sekolah Di SMA Negeri 11 Samarinda) dibawah bimbingan Dr. H. Syahrani, M.Si selaku pembimbing I dan Dr. Santi Rande, M.Si selaku pembimbing II.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Karakter Siswa Sebagai Budaya Sekolah serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Karakter Siswa Sebagai Budaya Sekolah dalam Pembinaan Budi Pekerti Luhur atau Akhlak Mulia Di SMA Negeri 11 Samarinda.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara *library research* dan *field work research* yaitu melalui observasi, wawancara langsung dngan informan dan penelitian arsip-arsip serta dokumen yang ada pada SMA Negeri 11 Kota Samarinda. Sumber data yang diperoleh dengan menggunakan teknik *puposive sampling*. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif, yang diawali dengan proses pengumpulan data (*data collection*), penyederhanaan data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusions drawing*).

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Karakter Siswa Sebagai Budaya Sekolah dalam Pembinaan Budi Pekerti Luhur atau Akhlak Mulia Di SMA Negeri 11 Samarinda belum berjalan secara optimal dapat dilihat dari komunikasi orang tua atau wali siswa masih kurang dimana baru diadakan 1 kali di semester ganjil, Alokasi dana yang diberikan dari pemerintah daerah terkadang tidak sesuai jadwal dan masih kurang dengan jumlah siswa, masih kurang memadainya sarana prasarana di sekolah, serta SMA Negeri 11 Kota Samarinda masih kurang tegas dalam memberikan sanksi kepada siswa, dan SMA Negeri 11 Kota Samarinda belum sepenuhnya menggunakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Karakter Sekolah Menengah Atas yang terdapat didalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 BAB VII Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Karakter Siswa Sebagai Budaya di Sekolah (pasal 17).

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pembinaan Karakter, Budaya Sekolah, SMA Negeri 11 Samarinda.

Pendahuluan

Latar Belakang Penelitian

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) telah menegaskan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Maraknya kenakalan remaja yang merupakan generasi penerus bangsa sehingga membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Munculnya kebijakan ini mempertegas diterapkannya pendidikan karakter di tahun ajaran 2015/2016. Dimana berdasarkan kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti bahwa penumbuhan budi pekerti adalah kegiatan pembiasaan sikap dan perilaku positif di sekolah yang dimulai berjenjang dari mulai sekolah dasar, untuk jenjang SMP, SMA/SMK, dan sekolah pada jalur pendidikan khusus dimulai sejak dari masa orientasi peserta didik baru sampai dengan kelulusan.

Di Kota Samarinda, muncul Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Karakter Siswa Sebagai Budaya di Sekolah mempertegas bahwa pendidikan karakter sangatlah penting, karena pendidikan karakter ini yang mempengaruhi bagaimana generasi penerus bangsa yang akan datang bertindak, dan berperilaku di masyarakat. Dalam observasi yang dilakukan peneliti di SMA Negeri 11 Samarinda, peneliti menemukan beberapa permasalahan kurangnya komitmen dari pihak sekolah dimana yang melakukan pelanggaran sanksi yang diberikan rata-rata hanya denda sebesar Rp.2000-Rp.5000, kurang tegasnya sanksi yang diberikan, bantuan dana BOS masih kurang serta penyaluran dana BOS tidak sesuai jadwal dan masih kurang memadai sarana dan prasarana sehingga mempengaruhi kegiatan program ini. Dari permasalahan diatas terlihat bahwa Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Karakter Siswa Sebagai Budaya di Sekolah terutama dalam Pembinaan Budi Pekerti Luhur atau Akhlak Mulia (Pasal 6) di SMA Negeri 11 Samarinda belum berjalan secara optimal.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Karakter Siswa Sebagai Budaya Sekolah dalam Pembinaan Budi Pekerti Luhur atau Akhlak Mulia Di SMA Negeri 11 Samarinda?

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Karakter Siswa Sebagai Budaya Sekolah dalam Pembinaan Budi Pekerti Luhur atau Akhlak Mulia Di SMA Negeri 11 Samarinda ?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Karakter Siswa Sebagai Budaya Sekolah dalam Pembinaan Budi Pekerti Luhur atau Akhlak Mulia Di SMA Negeri 11 Samarinda.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Karakter Siswa Sebagai Budaya Sekolah dalam Pembinaan Budi Pekerti Luhur atau Akhlak Mulia Di SMA Negeri 11 Samarinda.

Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu sosial terutama Ilmu Administrasi Negara, khususnya pada mata kuliah Kebijakan Publik.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini Sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya institusi pemerintahan dalam Pembinaan Budi Pekerti Luhur atau Akhlak Mulia Di Sekolah (Studi Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Karakter Siswa Sebagai Budaya Sekolah Di SMA Negeri 11 Samarinda).

Kerangka Dasar Teori

Teori dan Konsep

Kebijakan Publik

William N. Dunn (dalam Pasolong, 2014:39) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkantoran dan lain-lain.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan akan mencapai tujuannya. Menurut Van Horn dan Van Meter (dalam Syahrani, 2015:87) implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tindakan-tindakan dapat saja berupa usaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, yang terarah pada tujuan.

Pembinaan

Thoha (2005:182) mengemukakan bahwa pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu.

Pendidikan Karakter

Mulyasa, (2012:1) Pendidikan karakter merupakan upaya untuk membantu perkembangan jiwa anak-anak baik lahir maupun batin, dari sifat kodratnya menuju ke arah peradaban yang manusiawi dan lebih baik.

Pengertian Budi Pekerti

Secara etimologis budi pekerti dapat dimaknai sebagai penampilan diri yang berbudi. Secara leksikal, budi pekerti adalah tingkah laku, perangai akhlak, dan watak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional (dalam Gunawan, 2012:13) dikatakan, kata budi artinya alat batin yang merupakan paduan akal dan perasaan untuk menimbang baik dan buruk. Selanjutnya budi juga bermakna akhlak, perangai, tabiat, kesopanan.

Pembinaan Budi Pekerti Luhur atau Akhlak Mulia

Implementasi Pembinaan Budi Pekerti Luhur atau Akhlak Mulia diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Karakter Siswa Sebagai Budaya Sekolah (Pasal 6) antara lain :

- a. Melaksanakan tata tertib dan kultur sekolah;
- b. Melaksanakan gotong royong dan kerja bakti (bakti sosial);
- c. Melaksanakan norma-norma yang berlaku dan tata krama pergaulan;
- d. Menumbuhkembangkan kesadaran untuk rela berkorban terhadap sesama;
- e. Menumbuhkembangkan sikap hormat dan menghargai warga sekolah; dan
- f. Melaksanakan kegiatan 7 K (Keamanan, Kebersihan, Ketertiban, Keindahan, Kekeluargaan, Kedamaian dan Kerindangan).

Definisi Konsepsional

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas, Adapun definisi konsepsional dari penelitian ini yaitu : Pembinaan Budi Pekerti Luhur atau Akhlak Mulia Di SMA Negeri 11 Samarinda (Studi Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Karakter Siswa Sebagai Budaya Sekolah Di SMA Negeri 11 Samarinda) adalah suatu kegiatan yang merupakan keputusan yang dibuat pemerintah dalam proses pembangunan sumber daya manusia untuk mewujudkan perilaku siswa-siswi yang diaplikasikan dalam kata, perbuatan, pikiran, sikap dan perasaan, keinginan dan hasil karya yang berdasarkan nilai, norma dan etika yang berlaku baik di dalam sekolah, keluarga maupun masyarakat.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul pada penelitian ini maka penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini adalah tentang Pembinaan Budi Pekerti Luhur atau Akhlak Mulia Di Sekolah (Studi Implementasi Peraturan

Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Karakter Siswa Sebagai Budaya Sekolah Di SMA Negeri 11 Samarinda).

Fokus Penelitian

1. Syarat utama keberhasilan implementasi kebijakan :
 - a. Komunikasi antara pihak yang terkait.
 - b. Sumber Daya.
 - 1) Kemampuan Implementor.
 - 2) Ketersediaan Dana.
 - 3) Sarana dan Prasarana
 - c. Disposisi, Sikap Pelaksana.
 - d. Struktur Birokrasi.
2. Faktor penghambat dalam Implementasi Pembinaan Budi Pekerti Luhur atau Akhlak Mulia Di SMA Negeri 11 Samarinda (Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Karakter Siswa Sebagai Budaya Sekolah).

Jenis dan Sumber Data

- a. Metode *Purposive Sampling*
- b. Teknik *Accidental Sampling*

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer
2. Data sekunder
 - a. Dokumen-dokumen
 - b. Buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan media massa yang relevan dengan fokus penelitian
 - c. Internet/Wibsite

Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu :

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan teori dan data dari perpustakaan berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumen yang ada hubungannya dengan ruang lingkup penelitian ini, yang dipergunakan sebagai landasan pemikiran dan pembahasan.
2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*) yaitu :
 - a. Observasi, pengumpulan data dengan mengadakan penelitian langsung.
 - b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab untuk melengkapi keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen sebagai sumber data.

Teknik Analisis Data

1. Pengumpulan Data
2. Reduksi Data
3. Penyajian Data
4. Menarik kesimpulan

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum objek penelitian

Dengan mencermati profil sekolah, kita akan mengenal dan memahami program-program pendidikan serta memiliki gambaran mengenai input, proses, output dan out come prestasi siswa SMA Negeri 11 Samarinda yang berada di jalan Pelita IV Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda No .Telepon/Fax. (0541) 6242374, Website: sman11samarinda.sch.id dengan Luas tanah :20.000 m2, Luas Bangunan lantai bawah : 2396,8 m2, Status tanah dan bangunan Milik Pemerintah Daerah (Pemda) dengan jumlah ruang belajar 12 lokal kelas dengan waktu belajar Pukul 07.15 s.d. 14.00 Wita. Dan mata pelajaran sebagai muatan lokal yang terdiri dari kewirausahaan dan lingkungan hidup yang merupakan program dari pendidikan karakter.

Hasil Penelitian

Implementasi Kebijakan

Komunikasi

Keberhasilan implementasi salah satunya sangat tergantung pada faktor komunikasi yaitu kemampuan melakukan sosialisasi dan implementor mengetahui apa yang harus dilakukan.

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan di lapangan, penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor komunikasi dalam implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Karakter Siswa Sebagai Budaya di Sekolah dalam Pembinaan Budi Pekerti Luhur atau Akhlak Mulia di SMA Negeri 11 Samarinda, untuk komunikasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda dan SMA Negeri 11 Kota Samarinda sudah terlaksana dengan maksimal terlihat dari komunikasi yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda tentang pembinaan karakter ini kepada SMA Negeri 11 Kota Samarinda baik dalam rapat, pertemuan-pertemuan lain maupun melalui surat edaran, untuk siswa SMA Negeri 11 Kota Samarinda telah melakukan sosialisasi dengan siswa-siswi baik pada saat upacara bendera, guru mengajar maupun pada saat ada kegiatan kegiatan tertentu sehingga dapat terjalin komunikasi tentang pembinaan karakter ini. Sedangkan Untuk orang tua/wali siswa, SMA Negeri 11 Kota Samarinda sudah melaksanakan pertemuan di tahun ajaran baru mengenai Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Karakter Siswa Sebagai Budaya di Sekolah terutama dalam Pembinaan Budi Pekerti Luhur atau Akhlak Mulia tetapi masih dianggap kurang karena baru 1 kali.

Sumber daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting bagi kehidupan manusia, dalam menjalankan suatu program implementasi dibutuhkan sekali sumber daya manusia yang berkualitas dalam melaksanakan kebijakan, sarana prasarana serta daya yang dapat membantu program kebijakan tersebut berjalan.

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan untuk peningkatan kualitas dalam peningkatan mutu kemampuan para guru untuk penilaian perilaku terhadap guru di SMA Negeri 11 tertanggal 2 Januari - 31 Desember 2015 dimana kriteria

penilaian berdasarkan orientasi pelayanan, Integritas, Komitmen, Disiplin, Kerjasama, Kepemimpinan rata-rata penilaian perilaku Guru SMA Negeri 11 adalah baik tetapi untuk pelatihan khusus yang diadakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda dalam implementasi Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pembinaan karakter di SMA Negeri 11 Samarinda ini belum ada. Dalam penyediaan dana dalam kegiatan Pembinaan karakter di SMA Negeri 11 Kota Samarinda memang sudah ada bantuan dana baik itu BOSDA provinsi, kota, BOS, tetapi bantuan bantuan itu sering terlambat penyalurannya dan jumlah dananya tidak sesuai dengan jumlah siswa dan sekolah kurang transparansi kepada orang tua siswa. sarana dan prasarana merupakan penunjang kegiatan pendidikan karakter di SMA Negeri 11 Kota Samarinda tetapi untuk sarana dan prasarana di SMA Negeri 11 Kota Samarinda masih dapat dikatakan kurang memadai karena sebagian lab dijadikan ruang belajar serta tidak memiliki ruangan serbaguna/ketrampilan.

Disposisi, Sikap Pelaksana

Disposisi yaitu menunjukkan karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan pendidikan karakter di SMA Negeri 11 Kota Samarinda kegiatannya sudah berjalan dengan baik seperti literasi serta kegiatan sekbid 2. Tetapi SMA Negeri 11 Kota Samarinda masih kurang tegas dalam memberikan sanksi untuk para siswa sehingga para siswa masih melakukan pelanggaran serta sanksi yang diberikan tidak sesuai tata tertib sekolah yang berlaku karena berupa denda Rp. 2000 - Rp. 5000, hal tersebut dapat dikatakan SMA Negeri 11 masih kurang konsisten dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Karakter Siswa Sebagai Budaya di Sekolah terutama dalam Pembinaan Budi Pekerti Luhur atau Akhlak Mulia.

Struktur Birokrasi

Salah satu aspek dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Jadi dari hasil wawancara dapat disimpulkan untuk Standar Pelaksanaan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Karakter Siswa Sebagai Budaya di Sekolah terutama dalam Pembinaan Budi Pekerti Luhur atau Akhlak Mulia ini SMA Negeri 11 Kota Samarinda kurang mengetahui dan belum sepenuhnya melaksanakan standar yang terdapat didalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 BAB VII Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Karakter Siswa Sebagai Budaya di Sekolah pasal 17.

Faktor penghambat dalam Implementasi Pembinaan Budi Pekerti Luhur atau Akhlak Mulia Di SMA Negeri 11 Samarinda (Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Karakter Siswa Sebagai Budaya Sekolah).

Adapun yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan, masalah kurangnya dana dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13

Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Karakter Siswa Sebagai Budaya di Sekolah terutama dalam Pembinaan Budi Pekerti Luhur atau Akhlak Mulia, pengaruh lingkungan dari luar, sarana media teknologi informasi dan hiburan malam saat jam belajar menjadi tantangan dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Karakter Siswa Sebagai Budaya di Sekolah terutama dalam Pembinaan Budi Pekerti Luhur atau Akhlak Mulia ini dan masih kurang tegasnya sanksi yang diberikan bagi para siswa yang melanggar peraturan.

Pembahasan

Implementasi Kebijakan

Komunikasi

Menurut George C Edward III (dalam Syahrani, 2015:105-107), Keberhasilan implementasi salah satunya sangat tergantung pada faktor komunikasi yaitu kemampuan melakukan sosialisasi dan implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. “Untuk implementasi menjadi efektif, implementor yang bertanggung jawab mengimplementasikan keputusan harus tahu apa yang mereka seharusnya dan perintah untuk melaksanakan kebijakan, harus ditransmisikan kepada personil yang tepat, dan harus jelas, akurat, dan konsisten. Jika kebijakan pembuat keputusan melaksanakan tidak jelas, disalahpahami. Maka jelasnya, menimbulkan kebingungan bagi implementor tentang apa yang harus, kemungkinan bahwa para implementor tidak akan mengimplementasikan kebijakan sebagaimana yang diharapkan”. dikarenakan dalam program pembinaan karakter mempunyai target atau kelompok sasaran. Jadi sangat diperlukan adanya koordinasi baik antar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda serta SMA Negeri 11 Kota Samarinda serta siswa dan orang tua. Untuk komunikasi antar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda dengan SMA Negeri 11 sudah sangat baik bagi pihak SMA Negeri 11, karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda telah mengadakan sosialisasi langsung kepada Kepala Sekolah maupun berupa himbauan-himbauan dan surat-surat edaran untuk pelaksanaan program tersebut.

Sedangkan untuk komunikasi berupa sosialisasi ke para siswa pihak SMA Negeri 11 Kota Samarinda sudah menerapkan beberapa cara baik pada saat upacara bendera, peringatan hari besar, kegiatan-kegiatan lain maupun pada saat guru mengajar sehingga para siswa paham dan mengerti tentang pembinaan karakter ini. Sedangkan untuk orang tua siswa pihak SMA Negeri 11 Kota Samarinda komunikasi dilakukan dengan cara pertemuan-pertemuan yang baru diadakan 1 kali pada semester ganjil ini.

Sumber daya

Menurut George C Edward III (dalam Syahrani, 2015:105-107) “Sumber daya mencakup staf dengan ukuran yang tepat dan keahlian yang tepat, informasi yang relevan dan memadai tentang bagaimana mengimplementasikan kebijakan dan kepatuhan orang lain yang terlibat dalam implementasi, kewenangan untuk menjamin bahwa kebijakan yang dilakukan sebagai mereka diinginkan, dan fasilitas termasuk bangunan, peralatan, peralatan, tanah, dan persediaan, yang

semuanya memberikan pelayanan. Sumber daya yang tidak memadai berarti bahwa hukum tidak ditegakkan, pelayanan tidak disediakan, dan peraturan tidak dikembangkan”. dari sumber daya ini masih kurang dari segi dana, sarana dan prasarana tetapi untuk kemampuan implementor sudah memadai.

Disposisi, Sikap Pelaksana

Menurut George Edward III (dalam Subarsono, 2012:91) disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sikap demokratis. Dalam pelaksanaan Pembinaan Karakter Siswa Sebagai Budaya di Sekolah dalam Pembinaan Budi Pekerti Luhur atau Akhlak Mulia di SMA Negeri 11 Kota Samarinda, SMA Negeri 11 sendiri telah berusaha sebaik mungkin dalam menjalankannya hal ini telah terbukti dengan kekonsistenan untuk mengadakan kegiatan-kegiatan seperti Literasi (membaca Al-Quran 15 menit) dan selalu menyelipkan pendidikan karakter disetiap mata pelajaran dan kegiatan yang terdapat didalam sekbid 2 tentang Pembinaan Budi Luhur dan Akhlak mulia telah dilaksanakan namun jika dilihat dari sanksi yang diberikan kepada siswanya yang melakukan pelanggaran SMA Negeri 11 Kota Samarinda Masih dikatakan kurang tegas dalam memberikan sanksi dan sanksi yang diberikan tidak sesuai tata tertib yang berlaku disekolah.

Struktur Birokrasi

Menunjukkan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Menurut George Edward III (dalam Subarsono, 2012:92) struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. salah satu aspek dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak aspek struktur birokrasi mencakup mekanisme serta struktur organisasi itu sendiri.

Dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Karakter Siswa Sebagai Budaya di Sekolah terutama dalam Pembinaan Budi Pekerti Luhur atau Akhlak Mulia yang menjadi standar pelaksanaannya SMA Negeri 11 belum sepenuhnya menggunakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Karakter Sekolah Menengah Atas yang terdapat didalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 BAB VII Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Karakter Siswa Sebagai Budaya di Sekolah (pasal 17) dalam pembinaan karakter siswanya.

Faktor penghambat dalam Implementasi Pembinaan Budi Pekerti Luhur atau Akhlak Mulia Di SMA Negeri 11 Samarinda (Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Karakter Siswa Sebagai Budaya Sekolah).

Faktor penghambat dalam pelaksanaan Dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Karakter Siswa Sebagai Budaya di Sekolah terutama dalam Pembinaan Budi Pekerti Luhur atau Akhlak Mulia terhambatnya penyaluran dana untuk membiayai kegiatan dalam pembinaan karakter ini dan tidak sesuainya dana yang diterima sekolah dapat menghambat pembinaan karakter, dan yang menjadi tantangan

dalam pelaksanaan peraturan ini pengaruh lingkungan dari luar, sarana media teknologi informasi dan hiburan malam saat jam belajar menjadi tantangan dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Karakter Siswa Sebagai Budaya di Sekolah terutama dalam Pembinaan Budi Pekerti Luhur atau Akhlak Mulia ini dan masih kurang tegasnya sanksi yang diberikan bagi para siswa yang melanggar peraturan.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Karakter Siswa Sebagai Budaya di Sekolah dalam Pembinaan Budi Pekerti Luhur atau Akhlak Mulia di SMA Negeri 11 Kota Samarinda masih belum berjalan secara optimal.
2. Sudah terjalannya komunikasi yang baik antara pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda dengan SMA Negeri 11. Sedangkan untuk komunikasi dengan para siswa pihak SMA Negeri 11 Kota Samarinda sering mengadakan sosialisasi. Dan untuk komunikasi dengan orang tua atau wali siswa, SMA Negeri 11 Kota Samarinda masih kurang karena baru mengadakan pertemuan 1 kali.
3. Sumber daya di SMA Negeri 11 Kota Samarinda dilihat dari kemampuan implemementornya telah memadai, namun untuk alokasi dana yang diberikan dari pemerintah daerah terkadang tidak sesuai jadwal dan masih kurang dengan jumlah siswa (tidak sebanding dengan jumlah siswa) dan Sekolah kurang transparansi masalah dana kepada orang tua serta sarana dan prasarana di SMA Negeri 11 Kota Samarinda masih kurang memadai.
4. SMA Negeri 11 Kota Samarinda sangat komitmen dalam menjalankan implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Karakter Siswa Sebagai Budaya di Sekolah dimana telah dilaksanakan program Literasi dan kegiatan-kegiatan budi pekerti luhur atau akhlak mulia, namun untuk pelanggarannya yang dilakukan siswanya, SMA Negeri 11 Kota Samarinda masih kurang konsisten dalam memberikan sanksi serta sanksinya tidak sesuai dengan tata tertib yang berlaku di sekolah.
5. Dalam menjalankan Pembinaan Karakter SMA Negeri 11 Kota Samarinda belum sepenuhnya menggunakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Karakter Sekolah Menengah Atas yang terdapat didalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 BAB VII Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Karakter Siswa Sebagai Budaya di Sekolah (pasal 17)
6. Faktor penghambat yaitu dana untuk membiayai kegiatan dalam pembinaan karakter ini dan tidak sesuainya dananya dan penyalurannya tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan peraturan ini pengaruh lingkungan dari luar, sarana media teknologi informasi dan hiburan malam saat jam belajar serta masih kurang tegasnya sanksi yang diberikan bagi para siswa yang melanggar peraturan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya SMA Negeri 11 Kota Samarinda dapat saling koordinasi dengan baik kepada orang tua siswa misal dengan mengadakan pertemuan berupa rapat, seminar, maupun pendekatan dengan telepon pada saat awal semester, pertengahan semester maupun akhir semester, pada saat siswa melanggar peraturan berturut-turut.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda sebaiknya juga memberikan pelatihan khusus dalam Pelaksanaan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Karakter Siswa Sebagai Budaya di Sekolah, terutama SMA Negeri 11 Kota Samarinda baik untuk guru, staf, siswa, dll misal dalam bentuk seminar yang di isi oleh motivator-motivator.
3. Sebaiknya SMA Negeri 11 Kota Samarinda lebih terperinci dalam mengganggarkan kebutuhan sekolah serta program yang ada dan lebih transparansi kepada orang tua. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda sebaiknya bisa tepat waktu dalam penyaluran bantuan BOSDA ke sekolah agar tidak menghambat dalam proses pelaksanaan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Karakter Siswa Sebagai Budaya di Sekolah.
4. Sebaiknya SMA Negeri 11 Kota Samarinda harus lebih tegas dalam memberi sanksi bagi siswa yang melakukan pelanggaran, misal sanksi jika mereka atribut kurang lengkap sebaiknya diberi sanksi membeli buku baik itu buku menyangkut pelajaran, dongeng, cerita dll dan merangkumnya minimal 10 lembar atau menulis kata kata sebanyak 500 kalimat “saya tidak akan mengulangi perbuatan saya”, atau menggunakan sistem poin, karena jika hanya denda mereka akan terus melakukan pelanggaran tidak menimbulkan efek jera atau sebaiknya sanksi yang diberikan berdasarkan tata tertib sekolah yang ada.
5. Sebaiknya SMA Negeri 11 sudah bisa menggunakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Karakter Sekolah Menengah Atas yang terdapat didalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 BAB VII Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Karakter Siswa Sebagai Budaya di Sekolah (pasal 17).

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebiasaan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Gunawan, Heri. 2012. *Pendidikan Karakter : Konsep dan Implementasi*. Bandung. Alfabeta.
- Linkona, Thomas. 2012. *Educating For Character : Mendidik Untuk Membangun Karakter*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Listyarti, Retno. 2012. *Pendidikan Karakter*. Jakarta: Erlangga.

- Mulyasa, H.E. 2012. *Manajemen Pendidikan Karakter*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Muslich, Masnur. 2011. *Pendidikan Karakter : Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Munadi, M & Barnawi. 2011. *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan*. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA.
- Samani, M & Hariyanto. 2012. *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Subarono. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrani. 2015. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Makindo Grafika.
- Thoha, Miftah. 1993. *Pembinaan Organisasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pasolong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab. A. Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori & Proses*. Yogyakarta: MedPress.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS

Dokumen-dokumen :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.
- Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Karakter Siswa Sebagai Budaya Sekolah.
- Petunjuk Teknis Kemitraan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan dengan Keluarga dan Masyarakat

Sumber Internet :

- Uriwck: Pengertian Pembinaan. Yogyakarta. <http://www.kpkm..UGM.ac.id.com> diakses (20 Juli 2016)